

# Ta'dibuna

Jurnal Pendidikan Islam

Vol. 6, No. 1, April 2017, p-ISSN: 2252-5793, hlm 49-71

## PEMIKIRAN PENDIDIKAN A. MALIK FADJAR

**Hikmat Kamal<sup>1</sup>, Abuddin Nata<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

### ABSTRACT

The formulations of the problems of this research are: how does the educational pattern of thinking of A. Malik Fadjar? What are the indicators of educational thinking of A. Malik Fadjar? What do the factors contribute to the educational thinking of A. Malik Fadjar? And how is the relevance of educational thinking of A. Malik Fadjar with educational praxis? The aims of this research are to reveal and to find the educational thinking/ideas of A. Malik Fadjar. This research employed a qualitative design by investigating data from the writing of A. Malik Fadjar and others' original writing about A. Malik Fadjar. The data collected is then described holistically, comprehensively, and systematically, which is then analyzed by social history approach of Islamic educational thinking, i.e. an approach observing background of the emergence of the thinking with factors affecting it and the relevance of the thinking for the present and future time to locate conceptual and substantive ideas and thinking. The research concludes that A. Malik Fadjar has a modern-religious pattern of thinking. Modern, because his thinking is oriented to the present and future time, always accepts the changes, open-minded, innovative and progressive. Religious, because of his family background, education, and also his organization culture are based on Islamic values. His pattern of thinking is shown by his vision, mission, and aims of education, curriculum, human resources, institution, and educational management. This thinking is emerged affected by both internal and external factors. From internal, the factors affected his thinking are educational background, personality and family. While from external, the factors are environment, job position, and socio-political situation in his era. Lastly, educational thinking of A. Malik Fadjar is still relevant to apply to the present and future time.

**Keywords:** *A. Malik Fajar, education concept, Islamic education*

## I. PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa agama Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam termasuk di dalamnya hewan, tumbuhan, dan manusia (Rosyadi, Mujahidin and Muchtar, 2013). Manusia sebagai makhluk dinamis membutuhkan sarana untuk mengembangkannya secara dinamis dan berkelanjutan. Tempat yang mungkin untuk mengembangkan potensi dan dinamisasi diri adalah pendidikan. Pendidikan merupakan institusi tempat menempa diri manusia (Damanhuri, Mujahidin and Hafidhuddin, 2013). Karena pendidikan pada dasarnya adalah sarana untuk membimbing manusia sebagai manusia paripurna (Jalaluddin and Abdullah, 1997; Suhadi *et al.*, 2014).

Al-Quran sebagai sumber pemikiran Islam sangat banyak memberikan inspirasi edukatif yang perlu dikembangkan secara filosofis maupun ilmiah. Pengembangan demikian diperlukan sebagai kerangka dasar dalam membangun sistem pendidikan Islam, yang salah satunya dengan meng-introdukir konsep-konsep al-Quran tentang pendidikan. Lebih lanjut, al-Quran memiliki pandangan yang spesifik tentang pendidikan. Beberapa idiom banyak dijumpai dalam al-Quran, seperti kata *rabb* yang menjadi akar kata *tarbiyah*. *Tarbiyah* merupakan konsep pendidikan yang banyak digunakan hingga sekarang. Demikian pula, dengan idiom *qara'a* dan *kataba* juga mengandung implikasi kependidikan yang mendalam (Ahmad, 2010).

Modernisasi yang ditandai dengan pemikiran rasional menjadi keharusan bila pendidikan Islam ingin tetap *survive* dan berhasil (Damanhuri, Mujahidin and Hafidhuddin, 2013). Di tengah-tengah keterpurukan citra pendidikan Islam pada khususnya dan pendidikan nasional pada umumnya, bangsa memerlukan gagasan dan pemikiran para tokoh pendidikan Islam untuk mengatasinya (Mansur *et al.*, 2016). Tentu sangat pantas bila A. Malik Fadjar diteladani, yang dalam pandangan Abuddin Nata, corak pemikiran pendidikannya adalah modern, visioner, dan futuristik yang berpegang teguh kepada semangat ajaran al-Quran yang mengajarkan kemajuan, keseimbangan, egaliter, terbuka, demokratis, bersahaja, bertanggung jawab, dan peduli pada kepentingan kaum yang lemah (Nata, 2005). Dengan bahasa lain, Abuddin Nata menyatakan bahwa makna pendidikan bagi A. Malik Fadjar adalah sebagai alat perjuangan untuk memajukan umat, membangun kebudayaan dan pendidikan Islam, bukan sekedar memberikan bekal untuk kerja.

A. Malik Fadjar dalam pandangan Suyatno, dikenal sebagai tokoh pembaru dan praktisi pendidikan sekaligus berada pada posisi strategis dalam mengambil kebijakan. Namanya sering menghiasi berbagai media karena analisisnya yang memang tajam, pemikirannya memang jernih, akurat, dan original (Suyatno, 2009).

A. Malik Fadjar berpendapat bahwa dalam tataran normatif-filosofis, pendidikan Islam selalu berkuat pada perdebatan semantik. Apakah pendidikan Islam itu menggunakan peristilahan *tarbiyah*, *ta'lim*, atau *ta'dib*. Dari segi muatan (*content*) menurutnya pendidikan Islam masih dihadapkan pada persoalan dualisme-dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Selain itu, pendidikan Islam dinilai masih belum menuntaskan konsep-konsep normatif yang berhubungan dengan cita ideal manusia yang dihasilkan. Karenanya, diperlukan visi pendidikan yang kompetitif dan

komparatif yang dapat menjanjikan masa depan sehingga dari visi tersebut secara praksis dapat memenuhi logika persaingan pasar ke depan (Fadjar, 1992).

Banyak usaha telah dilakukan oleh A. Malik Fadjar untuk mengkonstruksinya sebagai amunisi memasuki masa depan. Gagasan-gagasan dan kebijakan-kebijakannya selalu mendapat respon positif bagi kemajuan pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Intelektualitas dan kapabilitasnya di bidang pendidikan bisa dilihat dari sejarah hidup yang diabdikannya pada lembaga-lembaga pendidikan yang dipimpinnya sehingga mencapai kualifikasi *academic excellence* dan *competitive advantage* di era global (Fadjar, 1998a).

Pemikiran A. Malik Fadjar yang prinsip tentang pendidikan Islam adalah mengenai bagaimana mengenalkan pendidikan yang betul-betul mampu menggambarkan *integrasi* keilmuan. Islam tidak mengenal dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan. Pandangan ini mengacu pada keyakinan Islam yang paling utama yaitu *tauhid*. Sehingga diperlukan reintegrasi keilmuan (agama dan umum) dalam dunia pendidikan Islam. Oleh karena itu, modernisasi dalam dunia pendidikan ditentukan oleh kualitas yang unggul dari berbagai aspek kehidupan (Rahim, 2001).

A. Malik Fadjar merupakan tokoh pendidikan yang mempunyai visi kemodernan dengan berpijak pada konsep tauhid yang bermuara pada integrasi keilmuan yaitu sains (*zikir*) dan teknologi (*fikir*). Yaitu melakukan dekonstruksi terhadap realitas keilmuan yang bersifat dualisme-dikotomis. Dengan terintegrasinya keilmuan tersebut, pendidikan Islam tidak kalah bersaing dengan pendidikan umum. Oleh karena itu, A. Malik Fadjar sangat mendukung perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)/Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Dengan demikian IAIN/STAIN secara praksis menjadi lembaga pendidikan yang lebih berkualitas, kompetitif dan memiliki nilai jual yang tinggi dalam merespons tantangan otonomisasi dan globalisasi (Barizi, 2005; Mansur *et al.*, 2016).

Keberhasilan A. Malik Fadjar dapat diamati baik dalam menyampaikan gagasan-gagasan pemikiran pendidikan maupun dalam melakukan inovasi konstruktif dalam mengembangkan lembaga pendidikan yang dikelolanya seperti UMM dan UMS. Begitu juga ketika beliau menjadi Direktur Jenderal Binbaga Islam Departemen Agama RI tahun 1996 - 1998, A. Malik Fadjar melakukan terobosan dengan mengubah status Fakultas Cabang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Di samping itu, A. Malik Fadjar juga mulai membuka jalan dalam konsep *wider mandate* (mandat yang diperluas) yang merupakan pemberian izin bagi IAIN tertentu untuk membuka program studi di luar bidang agama. Tujuannya adalah agar SDM IAIN dapat lebih berkembang, mandiri, dan kompetitif guna merespons tantangan otonomisasi dan globalisasi. Konsep ini kemudian dapat terwujud beberapa tahun kemudian dengan lahirnya 6 (enam) Universitas Islam Negeri (UIN) yaitu; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Syarif Kasim Pekanbaru Riau, UIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan, dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Wahyuni, 1995).

Hal lain yang pernah dilakukan A. Malik Fadjar dalam rangka pembaruan pendidikan adalah di saat beliau menjabat sebagai Menteri Agama RI tahun 1998 – 1999 dengan selalu mendorong peningkatan mutu pendidikan dan mengedepankan pendidikan sebagai *center of excellent* terutama di lingkungan madrasah, pesantren dan IAIN melalui pembaruan dalam kurikulum, sistem, manajemen dan juga membuka peluang-peluang untuk melakukan pengembangan di bidang akademik.

Selain integrasi keilmuan dan pentingnya pembaruan pendidikan Islam, A. Malik Fadjar juga mengarahkan pada pemahaman bahwa pendidikan itu selain sesuatu yang ideal juga mesti realistis terhadap kebutuhan hidup masyarakat.

Masih menurut A. Malik Fadjar, pendidikan merupakan investasi masa depan dan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, pendidikan sangat berperan memainkan kebutuhan sosial yang mendukung pertumbuhan dan memandu perjalanan hidup manusia. Lazimnya disebut *education is the necessity of life as social function, as growth, as direction*. Maka posisi pendidikan menjadi sebuah kegiatan yang merangkum kepentingan jangka panjang atau masa depan (Fadjar, 1998b).

Berangkat dari pemahaman bahwa pendidikan merupakan bagian dari pembaruan yang sangat esensial, karena fungsi pendidikan tidak hanya terbatas pada transformasi pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. Namun pendidikan juga bisa menjadi media untuk dapat mensosialisasikan ide-ide pembaruan secara gradual dan terarah. Pendidikan dijadikan sebagai elemen pembaruan Islam karena di dalamnya terdapat proses pendidikan dan pengajaran individu-individu, yang merupakan bagian dari masyarakat (Surahman *et al.*, 2014; Manti *et al.*, 2016). Apabila proses itu cenderung konstruktif maka akan melahirkan *output* yang positif, namun sebaliknya bila proses tersebut destruktif, maka yang akan terjadi adalah sebaliknya, dengan demikian pendidikan perlu diperbarui (Rahman, 1982).

Tujuan utama penelitian ini adalah mencari dan menemukan ide-ide pemikiran pendidikan A. Malik Fadjar. Sementara kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi lebih mendalam tentang ide-ide pemikiran pendidikan A. Malik Fadjar. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada civitas akademik khususnya dan masyarakat luas pada umumnya tentang ide-ide pemikiran pendidikan A. Malik Fadjar. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sekaligus masukan bagi lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam dalam melakukan pembaruan di masa yang akan datang.

## II. METODOLOGI

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran pendidikan A. Malik Fadjar. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian (Pawitasari, Mujahidin and Fattah, 2015).

Adapun langkah-langkah operasional yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah: pertama, melacak dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan

pemikiran pendidikan A. Malik Fadjar. Kedua, melakukan reduksi data untuk mengambil data yang diperlukan dan membuang data yang tidak diperlukan. Ketiga, melakukan inferensi data, yakni mengamati data dengan memperhatikan konteks data tersebut. Keempat, Menganalisis data dengan teknik *content analysis* (Manti *et al.*, 2016).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Corak pemikiran A. Malik Fadjar dalam bidang pendidikan, dapat dilihat pada gagasannya tentang visi, misi, dan tujuan pendidikan, kurikulum, Sumber Daya Manusia, kelembagaan, dan manajemen pendidikan, sebagai berikut:

#### A. Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan

Dengan memerhatikan sebagian besar gagasan-gagasannya yang berkaitan erat dengan dunia Pendidikan (Nata, 2005), visi A. Malik Fadjar dalam bidang pendidikan (khususnya perguruan tinggi) adalah mewujudkan perguruan tinggi yang modern (Hudijono and Thayib, 2006).

Rumusan visi tersebut, juga mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Iin Nurmarini (anak ke dua A. Malik Fadjar), bahwa Bapak memang ingin UMM menjadi besar. Bapak memiliki obsesi UMM menjadi seperti *Florida State University* (Hudijono and Thayib, 2006).

Selanjutnya, tentang misi atau langkah-langkah yang dilakukan A. Malik Fadjar untuk mencapai visinya yaitu merumuskan gagasan-gagasan atau cita-cita besar yang berdimensi jauh ke depan, menyangkut persoalan mau ke mana UMM dibawa. Untuk itu, ia lantas mengundang sejumlah tokoh yang mempunyai kepedulian terhadap masa depan UMM. Mereka berkumpul setiap Rabu pagi di kampus I Jln. Bandung tak kurang dari 12 orang yang mengikuti ajang diskusi tersebut. Setelah memperoleh gambaran yang cukup memadai tentang arah dan cita-cita yang hendak dicapai UMM, A. Malik Fadjar kemudian melakukan pentahapan dalam mengelola perguruan tinggi ini yaitu: *tahap konsolidasi, pembangunan fisik, dan pembangunan akademik* (Hudijono and Thayib, 2006).

Dalam setiap kesempatan bertemu dengan para dosen, khususnya pada bulan puasa yang ditulis dalam satu lembar kertas, A. Malik Fadjar selalu mengatakan, bahwa kita harus terus menerus melakukan konsolidasi, dari aspek *idiil, struktural, maupun operasional* (Fadjar, 1998b). Konsolidasi ketiga aspek mendasar ini diikuti dengan penertiban bidang administrasi akademik, keuangan maupun operasional. Termasuk menyatukan manajemen tunggal UMM dari kampus I dan II, yang sebelumnya berdiri sendiri. Tentu saja pada awalnya A. Malik Fadjar menghadapi tantangan berat. Tapi dengan piawai A. Malik Fadjar akhirnya berhasil melewati masa-masa kritis ini. Konsolidasi tiga aspek itu terus dilakukan dari waktu ke waktu, terutama selama periode pertama kepemimpinannya tahun 1983-1986.

Menurut A. Malik Fadjar bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan manusia paripurna (*insān kāmil*) yang berpijak pada konsep tauhid yang bermuara pada integrasi

keilmuan antara sains dan teknologi, jiwa dan raga, duniawi dan ukhrawi, yang pada akhirnya akan menciptakan umat yang terbaik (Fadjar, 1998b).

Demikianlah penetapan Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan yang merupakan bagian dari dinamika kemajuan budaya manusia dalam bidang pendidikan, dan penetapan itu dirasa saat ini sangat penting.

## **B. Kurikulum**

A. Malik Fadjar berpendapat bahwa kurikulum harus ditata dan diotonomikan sehingga pada praksisnya lebih sesuai dengan kebutuhan, bukan kurikulum yang bersifat "recehan" (kepingan-kepingan ilmu yang tak ber-dasarkan telaah ilmiah) seperti kurikulum yang ada pada Fakultas Tarbiyah terdapat mata kuliah fikih tarbiyah, tafsir tarbiyah, hadis tarbiyah, dan lain-lain. Kurikulum seperti ini ibarat "toko kelontong" yang menjual semua produk mereka yang justru jauh dari fondasi akademik (Barizi, 2005). Tegasnya, hemat penulis yang diinginkan A. Malik Fadjar adalah tidak perlu ada mata kuliah fikih tarbiyah, tafsir tarbiyah, hadis tarbiyah, dan lain-lain karena bersifat recehan. Jadi cukup ada mata kuliah tafsir, hadis, dan seterusnya tanpa penambahan kata di belakang nama mata kuliah tersebut.

Dengan penataan kurikulum yang lebih bersifat luas dan luwes, maka secara praksis diharapkan pendidikan harus lebih kreatif, inovatif, fleksibel dan produktif. Mata pelajaran yang dikembangkan dalam wilayah otonomi pendidikan lebih bersifat integrative (Barizi, 2005). Dalam arti mata pelajaran lebih ditekankan pada kajian yang bersifat multidisipliner, interdisipliner dan transdisipliner.

A. Malik Fadjar memiliki semangat akademik sangat besar guna memprodak orang-orang besar dan produktif, karena orang besar dan produktif hanya dilahirkan oleh lembaga yang otonom dan memiliki wawasan universal. Artinya bidang keilmuan dan pekerjaan tidak dibatasi dalam sebuah wawasan akademik. Karena menurut hemat penulis orang yang besar dan arif dalam perkembangan sejarah tidak pernah membatasi bidang keilmuan. Dengan demikian lebih banyak berbuat kebajikan lebih luas kepada agama, bangsa dan Negara.

A. Malik Fadjar berpendapat bahwa kurikulum bagaikan menu atau serangkaian jenis makanan dan minuman yang tersedia serta dapat dihidangkan. Sebuah menu makan tentunya yang selalu dijaga adalah segar, bersih dan nyaman serta berkesinambungan. Dalam kontek generasi, yang harus dijaga adalah kekaderan yang lebih baru dan baik untuk bangsa masa depan. Banyak pihak juga berpandangan, pembaruan pendidikan yang akan dilaksanakan nanti harus dirancang guna melahirkan "generasi baru", generasi yang akan mampu menyelesaikan masalah-masalah bangsa yang terasa makin menumpuk. Dalam hubungan ini juga sering dikemukakan, pembaruan pendidikan nanti harus mampu membina generasi mendatang menjadi manusia-manusia dengan karakter yang kuat, dengan jati diri yang jelas, dan dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi bangsa, baik masalah-masalah di masa kini maupun di masa datang. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa "kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan

memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian yang sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan".

Sebagai menu, kurikulum harus padat gizi dan terhidangkan dengan segar. Oleh karena itu, perbaikan dan pembaruan kurikulum harus terus menerus dilakukan secara berkala dan konsisten, bukan sekedar musiman dan hanya sekedar memenuhi selera sehingga mengesankan jika ganti menteri atau ganti pejabat, kurikulumnya juga diganti. Selain memperpadat gizi dan mem-persegar pemikiran, perbaikan dan pembaruan kurikulum juga harus mem-perhatikan nilai-nilai keutuhan dalam kerangka keilmuannya. Kecenderungan yang mengarah kepada penyempitan-penyempitan yang dialami selama ini perlu segera dibenahi kembali. Beban kurikulum seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan padatnya jam belajar seperti yang terjadi selama ini tetapi pada praktisnya miskin isi dan relevansinya (Fadjar, 1998b). Karena itulah memerlukan ukuran-ukuran dalam pengembangan kurikulum secara nasional.

Seluruh penelaahan kurikulum baru nanti harus dilakukan dengan pandangan ke depan, ke tujuan melahirkan generasi pembaru (Mujahidin, 2005). Penelaahan ini harus dilakukan dengan kesadaran, pembaruan pendidikan yang akan dilakukan bukanlah pembaruan terakhir dalam proses menuju lahirnya generasi pembaru. Yang harus diusahakan ialah, sebagai warga negara yang peduli dengan masa depan bangsa kita tidak bersikap masa bodoh (*apathetic*) terhadap langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah dan komunitas pendidikan umumnya untuk membenahi pendidikan. Yang kita pertaruhkan kini bukan saja masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita saja. Yang dipertaruhkan bersama ialah sesuatu yang lebih besar lagi, masa depan Bangsa Indonesia.

Perubahan kurikulum akan lebih dititikberatkan pada pemetaan kompetensi dasar peserta didik sehingga apa pun bentuk kurikulum pada suatu satuan pendidikan, ukuran yang terpenting dan prestasi peserta adalah penguasaan mereka terhadap standar kompetensi yang dituntut (Mujahidin, 2005). Pendekatan baru ini dilakukan melalui identifikasi dan penentuan kemampuan dasar lulusan, jenis dan bobot masing-masing mata pelajaran, dan kemampuan dasar setiap mata pelajaran pada berbagai jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Melalui pendekatan ini daerah atau sekolah dapat mengembangkan materi pengajaran sesuai dengan kondisi-kondisi lokal. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi dalam pengelolaan pendidikan.

Pasal 3 UU Sisdiknas 2003 menggambarkan bahwa pendidikan di Indonesia adalah pendidikan berbasis kompetensi, dengan pembelajaran siswa sebagai aktualisasi potensi menjadi kemampuan dasar yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan melalui perilaku akhlak mulia yang berdampak *rahmatan li al-'ālamīn* (Mansur *et al.*, 2016).

Pendidikan berbasis kompetensi memerlukan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) (Nata, 2006), dimana Pemerintah Pusat akan memberikan kerangka dasar serta strukturnya (Pasal 38 ayat 1), dan kemudian dikembangkan oleh kelompok atau satuan pendidikan (Pasal 38 ayat 2) bersama Komite Sekolah dalam Koordinasi Dinas Pendidikan/Kandepag. Di samping mengacu pada kerangka dasar dan strukturnya,

kurikulum berbasis kompetensi harus mengacu pada standar nasional pendidikan (Pasal 35) yang terdiri atas standar isi, standar proses dan standar kompetensi lulusan (Pasal 35 ayat 1). Ketiga komponen kurikulum berbasis kompetensi terlihat dalam rumusan tiga dimensi tujuan pendidikan berbasis kompetensi, yang terdiri atas tujuan yang berorientasi pada materi (*content objectives*), tujuan yang berorientasi pada kecakapan proses atau metode belajar dan berlatih untuk memiliki konsep atau materi keilmuan (*methodological objective*), dan Tujuan penguasaan kecakapan aplikasi kompetensi dasar dalam kehidupan.

### C. Sumber Daya Manusia

Pemikiran A. Malik Fadjar dalam kerangka kreativitas kerja berupaya untuk membangun sikap kemandirian, keterbukaan dan tanggung jawab. Kreativitas kerja merupakan buah dari ilmu dan iman. Untuk meningkatkan amaliah seseorang harus didukung oleh ilmu yang memadai, kemudian digali dan dikembangkan potensi yang ada, melalui proses membangun jaringan komunikasi dengan lembaga lain sehingga nampak terasa kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Pendidikan merupakan jalan yang terbaik dalam memberikan peluang untuk membangkitkan kreativitas kerja seseorang yang maksimal. Bila tidak maka akan melahirkan manusia bisu, malas dan akhirnya akan miskin lagi tertindas.

A. Malik Fadjar mengemukakan beberapa kriteria kreativitas sebagai berikut: *Pertama*, dalam respon-respon kreatif tercermin watak *novelty* (kebaruan atau *newness*) dan *original*. Ada sesuatu yang baru dan asli (tidak *repetitif*) dalam respon-respon yang ditampilkan oleh seseorang yang kreatif dalam menjawab atau menangani persoalan-persoalan yang dihadapi. Dalam diri manusia ada fitrah atau potensi untuk mengikuti kebiasaan atau struktur yang ada dan potensi untuk menghindarinya. Proses dialektika antara integrasi dan disintegrasi terhadap struktur ini adalah proses "menjadi" (*becoming*) atau "tumbuh" sebagai pribadi (Barizi, 2005).

Sesungguhnya kreativitas itu adalah wujud respon personal yang unik terhadap konflik internal dalam menghadapi berbagai persoalan sepanjang hidupnya. *Kedua*, dalam respon-respon kreatif terbukti secara efektif meng-gambarkan koherensi, kecocokan (*adaptiveness*) dengan situasi-situasi yang dihadapi yang terkadang dengan cepat mengalami perubahan. *Ketiga*, dalam respon-respon kreatif tergambar suatu bentuk "realisasi" yang bermanfaat dalam memecahkan segenap persoalan (*problems solving*) dasar kehidupan manusia. Ciri ini sekaligus menepis anggapan bahwa respon-respon kreatif bisa menampilkan Utopia atau sekadar impian-impian. *Keempat*, watak menonjol dari respon-respon kreatif ialah bahwa respon-respon itu dilandasi kesanggupan berpikir maupun menelaah secara *divergent* (dari berbagai sudut pandang), bukan berpikir *convergent* (dari satu sudut pandang). Kesanggupan berpikir divergen menjadi sangat penting, karena hal ini memungkinkan manusia sanggup menjelajahi berbagai alternatif. Respon-respon kreatif semacam ini perlu mendapat pemupukan dan penumbuhan yang lebih subur dalam sistem dan praktik pendidikan yang harus diciptakan (Barizi, 2005).



Kreativitas kerja dalam kehidupan individu-individu penting untuk ditumbuhkan guna untuk mewujudkan ekspektasi ke depan. Oleh karena itu, ada beberapa sebab tumbuhnya kreativitas kerja. *Pertama*, karena ia dapat mendatangkan imbalan yang bersifat materil seperti uang atau dalam bentuk lain berupa kepuasan batin. *Kedua*, kerja biasanya memerankan beberapa fungsi sosial bagi orang bersangkutan seperti menjadikannya berkesempatan untuk bergaul dengan orang banyak, mengembangkan persahabatan, dan sebagainya. *Ketiga*, Kerja seringkali menjadi sumber status sosial. *Keempat*, secara psikologis kerja juga dapat menjadi sumber identitas, harga diri, serta aktualisasi diri. Dalam buku *Organizational Behaviour and Personel Psychology* diterangkan bahwa kebanyakan pakar psikologi setuju tentang adanya motif kerja yang beraneka ragam (Wexley and Yukl, 1977).

A. Malik Fadjar mengemukakan hasil penelitian yang dilakukan Hans Jellen dari Universitas Utah, AS dan Klaus Urban dari Universitas Hannover Jerman bulan Agustus 1987 terhadap anak-anak berusia 10 tahun (dengan sample 50 anak-anak di Jakarta) menunjukkan tingkat kreativitas anak-anak Indonesia adalah yang terendah di antara anak-anak seusianya dari 8 negara lainnya. Berturut-turut dari skor tertinggi sampai terendah adalah Filipina, AS, Inggris, Jerman, India, RRC, Kamerun, Zulu, dan Indonesia (Barizi, 2005).

Terlepas dari pro dan kontra terhadap hasil penelitian tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan di Indonesia masih kurang memberikan atmosfer bagi penumbuhan dan pengembangan kemampuan kreativitas peserta didik. Peserta didik cenderung dituntut untuk memberikan jawaban yang "benar" menurut guru dan kurang diberi kesempatan untuk memberikan alternatif-alternatif jawaban tertentu yang menumbuhkan kreativitasnya. Peserta didik tidak diberi ruang untuk berimajinasi dan berkreasi. Peserta didik cenderung hanya menjadi objek dan diposisikan tidak tahu apa-apa sehingga harus dijejali sesuai kemauan guru. Mungkin saja ini merupakan produk dari pendidikan yang menindas, kurang memberikan ruang bagi keterlibatan peserta didik secara aktif, di samping suasana kelas yang terkesan seperti penjara.

John Vaisey dan B. G. Tilak Jandhayala sebagaimana yang dikutip oleh A. Malik Fadjar menyatakan bahwa pendidikan adalah dasar dari per-tumbuhan dan perkembangan ekonomi, sains dan teknologi, menekan dan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, serta peningkatan kualitas peradaban manusia pada umumnya. Selanjutnya, John Vaisey mengemukakan argumennya bahwa sejumlah besar dari apa yang kita ketahui diperoleh dari proses belajar secara formal di lembaga-lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) (Fadjar, 1998b).

Berdasarkan pandangan di atas, bahwa pendidikan menyimpan kekuatan luar biasa untuk menciptakan keseluruhan aspek lingkungan hidup dan dapat memberikan informasi yang paling berharga mengenai pegangan hidup masa depan di dunia, serta membantu anak didik dalam mempersiapkan kebutuhan hidup yang esensial demi menghadapi perubahan.

Selanjutnya Harold G Sementara itu, John Dewey berpendapat bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan hidup (*a neccesity of life*); sebagai bimbingan (*a direction*);

dan sebagai sarana pertumbuhan (*as growth*) (Dewey, 1964), yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. Pendidikan mengandung misi keseluruhan aspek kebutuhan hidup serta perubahan-perubahan yang terjadi (Fadjar, 1998b). Dari hal tersebut di atas memberi semangat bahwa dengan manusia berkualitas melalui pendidikan dapat memberi energi untuk selalu berkreasi di masyarakat sesuai dengan ilmu yang digelutinya sebagai nilai yang potensial dalam mewujudkan harapannya.

Sbane sebagaimana yang dikutip oleh A. Malik Fadjar menyatakan bahwa pendidikan memiliki empat potensi yang secara tegas signifikan dengan kehidupan masa depan. *Pertama*, pendidikan menyediakan wahana yang telah teruji untuk implementasi nilai-nilai masyarakat yang berubah, hasrat masyarakat yang muncul dan menimbulkan nilai-nilai baru. Sekolah tidak menciptakan hari esok tetapi dapat mencerminkan kebudayaan yang berubah dan menyiapkan anak-anak untuk berperan serta secara lebih efektif dengan usaha secara terus-menerus untuk mendapatkan jalan hidup yang baik. *Kedua*, pendidikan dapat dipakai untuk menanggulangi masalah-masalah sosial tertentu. *Ketiga*, pendidikan telah memperlihatkan kemampuan yang tinggi untuk menerima dan mengimplementasikan alternatif-alternatif baru. *Keempat*, pendidikan merupakan cara terbaik yang dapat ditempuh masyarakat untuk membimbing per-kembangan manusia, sehingga pengalaman dari dalam berkembang pada setiap anak dan karena itu ia terdorong untuk memberikan konsentrasi pada kebudayaan manusia yang lebih baik serta dapat dikembangkan dalam suasana psikologis yang baik (Fadjar, 1998b).

Mempertemukan pendidikan dan kreativitas peserta didik tentu saja bukan sesuatu yang sudah instan dalam sistem maupun model pelebagaan yang serba terbakukan. Dengan perkataan lain, perlu ditumbuhkembangkan proses belajar mengajar yang memadukan pendekatan ilmu pengetahuan dan kehidupan nyata secara terus menerus sehingga memperkaya inisiatif (*human initiative*). Proses belajar mengajar ini diperlukan terutama untuk menghadapi situasi-situasi baru dalam kehidupan dengan tidak melepaskan peran sekolah/madrasah sebagai lembaga formal bagi proses belajar mengajar.

Menurut A. Malik Fadjar, dalam dunia bisnis misalnya, kreativitas diminati untuk mampu menghasilkan kinerja unggul bagi pelanggan dan penanam modal. Program-program MBA di universitas-universitas Amerika kini melihat perlunya mencantumkan kajian kreativitas dalam kurikulum mereka. Tujuannya adalah dalam rangka menjangkau pebisnis unggul yang mampu mengalahkan pesaingnya di muka bumi ini (Barizi, 2005).

Lebih lanjut A. Malik Fadjar menyatakan bahwa selama ini proses belajar mengajar terasa "rutin" dan "statis". Kalaupun ada perubahan atau perbaikan sifatnya masih sepotong-sepotong dan parsial. Padahal pembaruan atau perbaikan tidak semata-mata menyangkut persoalan didaktik metodik saja, melainkan terkait pula dengan aspek-aspek pedagogis, filosofis, *input*, proses dan *output*. James W. Botkin menamai proses ini sebagai belajar dalam suasana inovatif (*innovative learning*) (Barizi, 2005).

Di samping pemikiran A. Malik Fadjar yang berkaitan tentang pengembangan kreativitas, beliau juga memiliki pemikiran dalam pengembangan SDM. Pengembangan SDM ini bermuara untuk memperkuat kebudayaan sebagai akar dan pendukung

kelangsungan pendidikan. Pengembangan kebudayaan membutuhkan kebebasan kreatif, sementara pendidikan membutuhkan stabilitas (Fadjar, 1992). Dengan demikian kualitas pendidikan akan menunjukkan kualitas budaya begitu pun sebaliknya. Keduanya akan menunjukkan kualitas manusia yang berbudaya, mempercepat potensi yang ada di daerah sehingga dapat bersaing dengan pangsa pasar ke depan. A. Malik Fadjar memberi contoh bahwa Jepang bisa maju dan tampil dalam percaturan kemajuan teknologi dan ekonomi dunia, bukan tergolong negara yang kaya sumber daya alam (SDA), tetapi Jepang yang menderita kekalahan dalam Perang Dunia II adalah termasuk negara yang mampu membangun maupun memanfaatkan SDM-nya (Fadjar, 1998b).

SDM Indonesia saat ini, dengan dukungan kekayaan SDA yang ada, barangkali bukan mustahil jika pada abad ke-21 mendatang Indonesia bisa tampil memainkan peranan yang sangat penting dalam percaturan ekonomi global yang diramalkan bakal bergeser dari kawasan Eropa-Atlantik ke kawasan Asia-Pasifik. Oleh karena itu, kerja keras merupakan sarana yang sangat efektif untuk menggali, merenung guna untuk memaknai dan mengartikulasi Tuhan secara luas. Dan hemat penulis bahwa “Kemalasan, kebodohan, kemiskinan bukan hanya sebagai dosa tapi merupakan bentuk yang paling tidak disukai Tuhan. Tuhan tidak hanya ingin manusia berpikir, bekerja, bersahabat, tetapi kenyataan/realitas alam merasakan kerja manusia sehingga dapat terwujud sebagai hamba yang terpilih. Sombong, angkuh, loba merupakan dosa penghalang menuju surga.”

Pendidikan Islam memiliki peranan yang sangat strategis bahkan paling penting dalam mengembangkan peradaban Islam hingga mencapai kejayaan umat Islam (Suhadi *et al.*, 2014). Dilihat dari objek formalnya, pendidikan memang menjadikan sarana kemampuan manusia untuk dibahas dan dikembangkan. Dalam kemajuan peradaban dan umat Islam, kemampuan manusia ini harus menjadi perhatian utama karena ia menjadi penentunya. Ini berarti kajian pendidikan berhubungan langsung dengan pengembangan SDM yang belakangan ini diyakini lebih mampu mempercepat kemajuan peradaban dari pada SDA. Ada banyak negara yang potensi alamnya kecil tetapi potensi SDM-nya besar mampu mengalahkan kemajuan negara yang SDA-nya besar tetapi SDM-nya kecil seperti negara Jepang. Bagaimana dengan Indonesia? Secara jujur harus diakui bahwa SDA Indonesia sangat besar namun SDM-nya kecil.

Sekarang ini negara Islam masih menjadi negara-negara yang berkembang dan bahkan ada yang terbelakang, karena SDM-nya yang masih lemah. Adakalanya negara Islam hanya mengandalkan SDA-nya sehingga menjadi negara yang kaya, seperti Saudi Arabia dengan minyaknya. Belum terbayangkan bagaimana jika sumber-sumber minyak itu terkuras habis, langkah apa yang akan dilakukan berikutnya jika kurang memperhatikan SDM. Akibatnya Saudi Arabia memang menjadi negara yang kaya, tetapi tidak mampu memainkan peranan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saudi Arabia tetap menjadi negara konsumen bagi hasil-hasil teknologi Barat. Hal ini terjadi karena pendidikan tidak memperoleh perhatian yang utama. Kalaulah pendidikan telah memperoleh perhatian besar baru pada tahap pendanaan, belum pada tahap strategi dan manajemen dalam membangun kualitas SDM-nya. Akibatnya, kualitas

pendidikan yang dihasilkan belum mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki karakter sebagai peneliti, penggali, penggagas dan penemu ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembangunan pendidikan bukanlah urusan yang sederhana, melainkan urusan yang menyangkut berbagai pihak, berbagai aspek dan dimensi dengan sifatnya yang sangat dinamis, kompleks, mendalam, dan luas. Pendidikan juga bukanlah sesuatu yang bersifat "*instant*", melainkan membutuhkan waktu yang lama dari proses yang panjang. Oleh karena itu memerlukan ketekunan dan kesungguhan dalam penanganannya. Di sisi lain, perubahan yang demikian cepat dan dinamis (Jalal and Supriadi, 2001). akibat kebijakan nasional menempatkan pemerintah daerah dan warga masyarakat di setiap daerah pada "posisi siap" dengan segala keuntungan dan risikonya, guna mencerahkan rakyat Indonesia.

Oleh Karena itu, seluruh bangsa Indonesia menurut A. Malik Fadjar harus "melek" ilmu pengetahuan dan teknologi (*science and technology literacy*); artinya, seluruh bangsa ini harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar dalam sains dan teknologi (Fadjar, 1998b). Watak dari sains dan teknologi tidak pernah statis, namun terus menerus mengalami perubahan dan kemajuan sebagai hasil dari riset/penelitian dan pengembangan, maka segenap bangsa ini perlu memiliki kemampuan belajar (*learning capability*) yang terus terpelihara. Pemeliharaan kemampuan belajar dikembangkan, baik dalam tatanan formal maupun non formal. Kemampuan belajar yang terus terpelihara ini nantinya mungkin terwujud manakala ditunjang kemampuan-kemampuan intelektual yang bersifat dasar. Maka menurutnya segenap bangsa Indonesia harus menguasai "*the basic*" yaitu mempunyai pengetahuan yang bersifat dasar dari berbagai aspek (Fadjar, 1998b).

Menurut Sofian Effendi kebijakan pendidikan yang ditetapkan A. Malik Fadjar dalam rangka peningkatan SDM adalah agar pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dikenal dengan *community college*. Konsep ini diarahkan bahwa tidak semua lulusan SLTA harus melanjutkan ke perguruan tinggi untuk dididik sebagai peneliti dan akademisi. A. Malik Fadjar membagi mahasiswa di perguruan tinggi untuk dididik sebagai peneliti dan akademis, dan ada juga yang dipersiapkan untuk kebutuhan industri. Ini sangat relevan dengan konteks sekarang dan di negara industri mana pun menggunakan seperti itu. Pemikiran ini aktual, tetapi tidak berjalan dengan baik sehingga terjadi pengangguran sarjana, karena tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.

Sejalan dengan ini, Muhadjir Effendy juga menyatakan bahwa A. Malik Fadjar telah meletakkan dasar-dasar UMM Malang dan kaderisasi serta memberi Perguruan Tinggi dan Masjid yang riil dan bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Menghilangkan bayang-bayang PTN, melakukan rekrutmen dosen sendiri secara besar-besaran, dan memutus dosen-dosen sambilan serta mengangkat pejabat-pejabat yang masih muda dan potensial.

#### **D. Kelembagaan (Pesantren, Madrasah, Sekolah, dan Kampus Model)**

Nurcholish Madjid lebih merasa optimis dari gurunya sendiri Fazlur Rahman yang mengatakan bahwa kemungkinan besar madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren akan menjadi *feeder institution* sumber input bagi lembaga-lembaga Islam negeri (Rahman, 1982). Sebab, Nurcholish Madjid lebih dari itu melihat “pesantren” dimungkinkan sebagai lembaga pendidikan masa depan Indonesia (Yasmadi, 2002).

Menyadari keunggulan pesantren, A. Malik Fadjar melihat gagasan Nurcholish Madjid tersebut sebagai pemikiran yang perlu direnungkan kembali.

Dengan mengutip pernyataan Nurcholish Madjid, A. Malik Fadjar menulis, seandainya negeri kita ini tidak mengalami penjajahan, kata Nurcholish Madjid, tentulah pertumbuhan sistem pendidikan di Indonesia akan mengikuti jalur-jalur yang ditempuh pesantren itu. Sehingga perguruan tinggi tidak akan berupa UI, ITB, IPB, UGM, UNAIR, dan lain-lain, tetapi mungkin akan bernama Universitas Tremas, Krapyak, Tebuireng, Bangkalan, Lasem, dan sebagainya. Kemungkinan ini ditarik, masih menurut Nurcholish Madjid, setelah melihat dan membuat kias secara kasar terhadap pertumbuhan sistem pendidikan di negara-negara Barat, di mana perguruan-perguruan tinggi terkenal di sana cikal bakalanya adalah perguruan-perguruan keagamaan. Mungkin juga seandainya kita tidak pernah dijajah, pesantren-pesantren tidak begitu jauh terperosok ke dalam daerah pedesaan yang terpencil seperti sekarang, melainkan tentunya akan berada di kota-kota pusat kekuasaan atau ekonomi, sekurang-kurangnya tidak terlalu jauh dari sana, sebagai halnya sekolah-sekolah keagamaan di Barat yang kemudian tumbuh menjadi universitas-universitas (Majid, 1992).

Kemudian A. Malik Fadjar memberikan ulasan sebagai penilaian terhadap ungkapan Nurcholish Madjid tersebut: Ungkapan Nurcholish Madjid di atas mungkin terkesan klise atau gagasan utopis bagi orang yang sudah terlanjur terbingkai dalam wacana modernisme. Akan tetapi dengan mempertimbangkan kelebihan yang dimilikinya, bukan tidak mungkin pesantren akan dilirik sebagai alternatif di tengah pengapnya suasana pendidikan formal di Indonesia, termasuk juga perguruan tinggi sebagai jenjang pendidikan formal paling tinggi (Majid, 1992).

Pada sistem madrasah tidak selalu ada pondok, masjid, dan pengajian kitab-kitab klasik. Unsur-unsur yang diutamakan di madrasah adalah pimpinan, guru, siswa, perangkat keras, perangkat lunak, dan pengajaran mata pelajaran agama Islam (Supiana, 2008).

Sebenarnya, sistem madrasah mirip dengan sistem persekolahan di Indonesia, para siswa tidak diharuskan tinggal mondok di kompleks madrasah, siswa cukup datang ke madrasah pada jam-jam berlangsungnya pelajaran pada pagi atau sore hari. Juga tidak disyaratkan adanya masjid di lingkungan madrasah, walaupun siswa bermaksud melaksanakan salat, mereka melaksanakannya di ruang yang telah ditentukan untuk itu. Kyai adalah seorang alim yang sangat dihormati tidak mesti ada, cukup pimpinan madrasah dan aparat-aparatnya. Pengajian kitab-kitab klasik pun tidak mesti ada di

madrasah. Pelajaran yang diajarkan telah tercantum dalam kurikulum dan silabus, dan diuraikan dalam garis besar program pengajaran (GBPP) (Supiana, 2008).

Kata “*madrasah*” berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti atau setara maknanya dengan kata Indonesia “sekolah”. “Sekolah” dialihkan dari bahasa asing; yakni *school* atau *scola*. Madrasah mengandung arti tempat atau wahana anak mengenyam proses pembelajaran. Maksudnya, di madrasah anak menjalani proses belajar secara terarah, dipimpin dan terkendali. Dengan demikian, secara teknis madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah. Hanya dalam lingkup kultural, madrasah memiliki konotasi spesifik. Di lembaga ini anak memperoleh pembelajaran hal ihwal atau seluk-beluk agama dan keagamaan, sehingga dalam pemakaiannya, kata madrasah lebih dikenal sebagai sekolah agama. Kata madrasah yang secara harfiah identik dengan sekolah agama diakui telah mengalami perubahan, walaupun tidak melepaskan diri dari makna asal sesuai dengan ikatan budayanya, yakni budaya Islam.

Non Pesantren (madrasah) biasanya menyelenggarakan pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (TK/RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Perguruan Tinggi Islam (PTAI).

Sedangkan lembaga pendidikan pesantren ada juga yang mengelola madrasah diniyah saja, diniyah plus TK, MI, MTs, MA dan PTAI. Bahkan ada juga pesantren yang mengelola Diniyah, TK, MI, MTs, MA, PTAI, SD, SMP, SMA dan PTU.

Sementara lembaga pendidikan Diniyah Murni merupakan bagian sangat kecil dari pendidikan pesantren sekitar 1-2 persen. Sifat pendidikannya adalah non formal yaitu ikut mengaji atau belajar agama di sela-sela berbakti kepada kiai dan pesantren. Di lembaga ini peserta didiknya pada umumnya sudah dewasa, bahkan sudah tua.

Di samping madrasah (non pesantren), pesantren dan Diniyah murni ada lagi lembaga pendidikan Islam berikutnya yaitu Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Sampai saat ini PTAI swasta dibina dan dikelola oleh organisasi wilayah Kopertais (Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta) di mana setiap UIN/IAIN menjadi pembinaanya.

Sedangkan menurut Husni Rahim eksistensi dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia berasal dari proses interaksi misi Islam dengan tiga kondisi, *Pertama*, interaksi Islam dengan budaya lokal -pra Islam- telah melahirkan pesantren. *Kedua*, interaksi pendidikan Islam dengan tradisi Timur Tengah telah menghasilkan lembaga madrasah, dan *Ketiga*, interaksi Islam dengan politik pendidikan Hindia Belanda telah membuahkan lembaga sekolah Islam (Rahim, 2005).

Interaksi pendidikan Islam dengan tradisi Timur Tengah yang telah menghasilkan lembaga madrasah dalam khazanah kehidupan manusia Indonesia merupakan fenomena budaya yang telah berusia satu abad lebih. Bahkan bukan suatu hal yang berlebihan, madrasah telah menjadi salah satu entitas budaya Indonesia yang dengan sendirinya menjalani proses sosialisasi yang relatif intensif. Indikasinya adalah kenyataan bahwa wujud entitas budaya ini telah diakui dan diterima kehadirannya. Secara berangsur

namun pasti, ia telah memasuki arus utama pembangunan bangsa menjelang akhir abad ke-20 ini. Dengan pemberdayaan secara optimal lembaga ini, diharapkan mampu secara optimal membangun SDM Indonesia (Fadjar, 1998a).

A. Malik Fadjar telah melakukan berbagai upaya yang ditujukan untuk peningkatan mutu, memperluas kesempatan belajar, peningkatan relevansi, memantapkan manajemen Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagai bagian dari gerakan nasional Wajib Belajar 9 (Sembilan) tahun. Demikian juga pada jenjang pendidikan menengah, berbagai terobosan telah dilakukan untuk memantapkan Madrasah Aliyah (MA) antara lain pengembangan Madrasah Aliyah Model, Madrasah Aliyah Keterampilan di seluruh wilayah tanah air, merasionalisasi organisasi Perguruan Tinggi Agama Islam yaitu mengubah fakultas cabang dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Hal tersebut memungkinkan fakultas cabang tersebut berdiri sendiri dan berkembang. Pada kelanjutannya perubahan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) adalah untuk merespons perkembangan global. Yaitu Perguruan tinggi Islam di bawah naungan Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bagian integral dari pendidikan Nasional dituntut mampu mempertimbangkan perubahan transisi sosial, ekonomi, politik nasional dan global. Langkah strategis dan futuristik A. Malik Fadjar bukanlah hal yang baru. A. Malik Fadjar hanya melakukan *rekonstruksi* dan reformulasi pemikiran para tokoh pendiri negara (*founding fathers*) sejak zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, di antara tokoh tersebut adalah K.H. Ahmad Dahlan, Mohammad Natsir, dan A. Mukti Ali. Kita memang harus melakukan *think and rethink*, demikian kata A. Malik Fadjar (Idris, 2008).

Dari wawancara penulis dengan A. Malik Fadjar di Auditorium Prof. Dr. Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis, 28 Juni 2012, beliau mengatakan pendidikan itu baru boleh dikatakan berhasil kalau ada proses kesinambungan dan melahirkan generasi-generasi baru.

Berdasarkan pernyataannya tersebut penulis berpandangan bahwa pemikiran pendidikan A. Malik Fadjar bercorak *modernis* (Echols and Shadily, 1979), karena pemikirannya berorientasi pada masa sekarang dan yang akan datang, selalu menerima perubahan, bersikap terbuka, inovatif dan progresif. Corak pemikiran A. Malik Fadjar ini nampaknya identik dengan pemikiran tokoh cendekiawan yang dikaguminya yang juga bercorak modernis, yaitu K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923), Mohammad Natsir (1908-1993), dan A. Mukti Ali (1923-2004).

Van Leur -seorang Indonesianis- sebagaimana yang dikutip oleh A. Malik Fadjar menyatakan bahwa "tanpa pendidikan, Islam dan umat Islam di Indonesia tidak akan terwujud" (Fadjar, 2007). Hal ini menggambarkan bahwa peran lembaga-lembaga pendidikan Islam sangat menentukan dalam penyebaran agama Islam melalui dakwah. Jauh sebelum Indonesia merdeka telah ada lembaga-lembaga pendidikan itu meskipun masih berupa surau, langgar, pesantren, pondok dan sebagainya. Lembaga-lembaga ini kemudian dijadikan cikal bakal lahirnya "madrasah" yang namanya beragam, seperti Muallimin, Muallimat, Diniyah, Kulliyatul Muballighin, Normal Islam dan sebagainya.

Tuntutan pengembangan madrasah akhir-akhir ini dirasa cukup tinggi. Pengembangan madrasah di pesantren yang pada umumnya berlokasi di luar kota dirasa tidak cukup memenuhi tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, banyak model pendidikan madrasah bermunculan di tengah kota, baik di kota kecil maupun di kota-kota metropolitan. Meskipun banyak madrasah yang berkembang di luar lingkungan pesantren, budaya agamanya, moral dan etika agamanya tetap menjadi ciri khas dalam mengomunikasikan lembaga pendidikan Islam. Etika pergaulan, perilaku dan *performance* pakaian para santrinya menjadi daya tarik dan nilai jual tersendiri di tengah kemajuan sains dan teknologi berkembang pesat, di saat filsafat hidup manusia modern mengalami kegersangan spiritual. Madrasah tetap menjanjikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat sebagaimana tujuan pendidikan Islam.

Menurut A. Malik Fadjar keberadaan dan peran madrasah beserta seluruh pranata kehidupan beragamanya selain sebagai wadah kegiatan pendidikan sekaligus menjadi tempat "pengaderan dan pergerakan". Maka dalam sejarah pergerakan Islam di Indonesia banyak sekali tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpinnya yang (Fadjar, 2007). Dalam hal ini "pengakuan" maupun "kepercayaan" bukan bersifat formal, tetapi lebih pada realitas dan kualitasnya.

Baru sesudah Indonesia merdeka keberadaan madrasah diakui sebagai lembaga pendidikan yang berdasarkan agama yang diperlukan untuk memelihara kepentingan-kepentingan khusus. Hal ini menurut A. Malik Fadjar nampak jelas dalam:

1. Pengumuman BPKNIP tanggal 22 Desember 1945 No. 15 (Berita RI tahun II No. 4 dan 5 halaman 20 kolom 1), antara lain "menganjurkan supaya dalam memajukan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya di-usahakan agar pendidikan di langgar-langgar dan madrasah-madrasah ber-jalan terus dan diperpesat".
2. Tanggal 27 Desember 1945 BPKNIP mengambil keputusan yang antara lain bermaksud supaya madrasah-madrasah mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah.
3. Panitia Penyidik Pengajaran RI yang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara dengan 51 anggota dalam laporannya tanggal 2 Juni 1946, menerangkan bahwa pengajaran yang bersifat pondok, pesantren dan madrasah, dipandang perlu untuk dipertinggi serta dimodernisasi serta diberi bantuan berupa biaya dan lain-lain, sesuai dengan yang telah diputuskan oleh BPKNIP akhir tahun 1945 (Fadjar, 2007).

Semua itu menunjukkan bahwa keberadaan dan posisi madrasah lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam pengembangan pendidikan. Madrasah membawa semangat masyarakat dalam upaya membangun pendidikan guna mencerahkan bangsa. Meskipun demikian tidak mengharap bantuan dan pengakuan terhadap pemerintah tetapi perhatian dan keseriusan pemerintah terhadap pembangunan dan kemajuan pendidikan sangat diharapkan. Semangat ini harus dikembangkan dan menata jaringan komunikasi ke luar, sehingga madrasah semakin tertantang dan dinamis.

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dengan bersentuhan dengan Barat sebagai buah dari intervensi budaya dan politik pemerintah Hindia Belanda dalam paruh



pertama abad ke-20 ternyata berpengaruh pula terhadap pembentukan format madrasah. Gerakan internal pembaruan Islam sudah barang tentu merupakan variabel penting dalam pembentukan format madrasah.

Menurut A. Malik Fadjar, ada dua kecenderungan yang dapat diidentifikasi pada pengembangan format pendidikan madrasah. *Pertama*, madrasah-madrasah *diniyah-salafiyah* terus tumbuh dan berkembang dengan penambahan jumlah maupun penguatan kualitas sebagai lembaga *tafaqquh fi al-din*, yakni lembaga untuk (semata-mata) mendalami agama.

*Kedua*, makin bermunculan madrasah-madrasah yang selain mengajar-kan dan mendidik ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam, juga memasukkan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda, seperti Madrasah Adabiyah di Sumatera Barat, dan madrasah yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Persatuan Islam, PUI dan NU. Bahkan ada pula madrasah yang sudah memasukkan ke dalam kegiatan kurikulumnya upaya membangun ekonomi kerakyatan di lingkungan umat Islam, seperti yang dilakukan oleh PUI di Majalengka (Fadjar, 1997).

Pola-pola madrasah ini dapat ditemui sampai sekarang. Madrasah akan selalu mengalami dinamika dan inovasi seiring dengan kemajuan dan perkembangan sains dan teknologi. Baik disebabkan dari aspek tuntutan penyesuaian maupun *reinvention* (penemuan kembali).

Proses perjalanan madrasah selama masa Indonesia merdeka, Departemen Agama telah berusaha mengembangkan intervensi-intervensi terencana untuk mendesain madrasah secara fungsional sebagai salah satu lembaga layanan pendidikan bagi penduduk Muslim Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Tidak seluruh kebijakan lahir dengan gampang. Ia harus memiliki kekuatan tawar-menawar kultural, dan dalam kadar tertentu bisa bersifat politik. Sekurang-kurangnya untuk melahirkan kebijakan madrasah perlu diakomodasikan berbagai kepentingan masyarakat (Fadjar, 1997).

Dalam rangka pengembangan madrasah, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama (waktu itu yang menjabat Menteri Agama adalah Mukti Ali mulai tahun 1972-1977), tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. SKB 3 Menteri yang merupakan arahan dari Presiden Soeharto pada Sidang Kabinet Terbatas tanggal 26 November 1974 telah menetapkan bahwa:

1. Yang dimaksud dengan madrasah, dalam Keputusan Bersama ini ialah: Lembaga Pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30%, di samping mata pelajaran umum.
2. Madrasah itu meliputi tiga tingkatan:
  - a. Madrasah Ibtidaiyah, setingkat dengan Sekolah Dasar (SD).
  - b. Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
  - c. Madrasah Aliyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tujuan SKB 3 Menteri tentang Madrasah tersebut agar tingkat mata pelajaran umum dari madrasah mencapai tingkat yang sama dengan tingkat mata pelajaran umum di Sekolah Umum yang setingkat, sehingga:

1. Ijazah Madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah Sekolah Umum yang setingkat.
2. Lulusan Madrasah dapat melanjutkan ke Sekolah Umum setingkat lebih atas.
3. Siswa Madrasah dapat berpindah ke Sekolah Umum yang setingkat (Fadjar, 2007).

SKB 3 Menteri ini menurut A. Malik Fadjar sesungguhnya adalah dalam rangka menempatkan posisi peserta didik atau lulusannya pada taraf dan mutu, serta pada konteks kemasyarakatan yang lebih luas. Hal ini terungkap jelas dalam salah satu diktum pertimbangannya, yaitu bahwa dalam rangka pencapaian tujuan nasional pada umumnya dan mencerdaskan kehidupan bangsa pada khususnya, serta memberikan kesempatan yang sama kepada tiap-tiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan memberikan kesempatan untuk mendapat pengajaran yang sama bagi tiap-tiap warga negara Indonesia, perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah agar lulusan dari madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi (Fadjar, 1998a).

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam kini ditempatkan sebagai pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional (Jamaluddin, 2003; Rosyadi, Mujahidin and Muchtar, 2013). Munculnya SKB 3 Menteri tersebut secara praksis menunjukkan bahwa eksistensi madrasah sudah mengotonomikan dan bukan lagi dikotomi, sehingga sudah dapat ber-kompetisi dan sinergik dengan sekolah umum. Di samping itu, keluarnya SKB 3 Menteri tersebut juga dinilai sebagai langkah positif dan inovatif bagi peningkatan mutu madrasah baik dari status, nilai ijazah, maupun kurikulum-nya. Langkah strategis madrasah tersebut merupakan suatu pembaruan yang mencerminkan pendidikan yang membebaskan.

Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pada periode Menteri Agama A. Mukti Ali, ia menawarkan konsep alternatif pengembangan madrasah melalui kebijakan SKB 3 Menteri yang berusaha mensejajarkan kualitas madrasah dengan non madrasah, dengan porsi kurikulum 70% umum dan 30% agama. Pada periode Menteri Agama Munawir Sadzali menawarkan konsep madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dan pada periode Menteri Agama Tarmizi Taher menawarkan konsep madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam (Muhaimin, 2003).

Menurut A. Malik Fadjar, apapun perubahan yang ingin dicapai, kebijakan-kebijakan mengembangkan madrasah menuju era otonomi dan globalisasi perlu mengakomodasikan tiga kepentingan. *Pertama*, kebijakan itu harus memberi ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama umat Islam, yakni menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktek hidup Islami yang lebih otonom.

*Kedua*, kebijakan itu memperjelas dan memperkukuh keberadaan madrasah sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian serta

produktif sederajat dengan sistem sekolah. Porsi dari kebijakan ini tidak lain agar pendidikan madrasah sanggup mengantarkan peserta didik memiliki penguasaan secara memadai, yaitu penguasaan pengetahuan dan kemampuan dasar dalam bidang bahasa, matematika, fisika, kimia, biologi, ilmu pengetahuan sosial dan pengetahuan kewarganegaraan. Madrasah juga merupakan tempat persemaian yang baik untuk menumbuhkan kreativitas seni, serta juga sebagai tempat berlatih dalam mengembangkan keterampilan bekerja.

*Ketiga*, kebijakan itu harus bisa menjadikan madrasah mampu merespons tuntutan-tuntutan masa depan. Untuk ini madrasah perlu diarahkan kepada lembaga yang sanggup melahirkan SDM yang memiliki kesiapan memasuki era globalisasi, era industrialisasi dan era informasi (Fadjar, 1998a).

Pandangan A. Malik Fadjar di atas yang bermuara pada pembaruan dan rekonstruksi pendidikan pada prinsipnya memperkuat pendapat Karel A. Steenbrink menyatakan bahwa terdapat tiga hal dalam pengembangan pendidikan madrasah, yaitu: usaha menyempurnakan sistem pendidikan pesantren, penyesuaian dengan sistem pendidikan Barat, dan upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan Barat (Steenbrink, 1986).

Ketiga komponen tersebut di atas menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang lebih luas, dinamis dan kompetitif guna memenuhi logika persaingan pasar ke depan.

Menurut A. Malik Fadjar, meskipun realisasinya tidak mudah, madrasah telah menjadi sebuah jalan keluar yang cukup strategis, baik dari sisi posisi maupun prospeknya. Karena kenyataan menunjukkan bahwa madrasah memang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bahkan di daerah-daerah yang umat Islamnya minoritas pun ada madrasah. Hanya saja hampir 95% madrasah statusnya swasta, sehingga lebih bergantung pada kekuatan umatnya. Sementara dari Pemerintah (Pusat maupun Daerah) sifatnya hanya berupa bantuan saja. Maka pada umumnya kondisi madrasah kurang meyakinkan. Apalagi faktor manajemennya yang kurang profesional, kecuali yang berbasis pada pondok pesantren.

Pemikiran A. Malik Fadjar dalam pengembangan madrasah sungguh luar biasa seandainya bisa diwujudkan dengan baik. Meskipun demikian, terlepas dari berbagai kekurangannya, madrasah yang memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki oleh model lembaga pendidikan lainnya itu menjadi salah satu tumpuan harapan bagi manusia modern di era globalisasi untuk mengatasi keringnya hati dari nuansa keagamaan dan menghindarkan diri dari fenomena demoralisasi dan dehumanisasi yang semakin merajalela seiring dengan kemajuan peradaban teknologi dan materi.

Sebagai jembatan antara model pendidikan pesantren dan model pendidikan sekolah, madrasah menjadi sangat fleksibel diakomodasikan dalam berbagai lingkungan. Di lingkungan pesantren, madrasah bukanlah barang yang asing karena memang lahirnya madrasah merupakan inovasi model pendidikan pesantren.

Dengan kurikulum yang disusun rapi, para santri lebih mudah mengetahui sampai di mana tingkat penguasaan materi yang dipelajari. Masyarakat metropolitan tidak malu mendatangi dan bahkan memasukkan putra-putrinya ke pesantren dengan model pendidikan madrasah. Baik mereka yang sekedar berniat menempatkan putra-putrinya pada lingkungan yang baik (agamis) hingga yang benar-benar menguasai ilmu yang dikembangkan di pesantren tersebut.

A. Malik Fadjar memberi contoh bahwa di Malang terdapat MIN, MTsN dan MAN yang posisi dan prospeknya cukup menjanjikan. Artinya lulusannya cukup terpendang dan diperebutkan. Juga ada Madrasah Insan Cendekia di Serpong, Tangerang Selatan dan di beberapa daerah lainnya. Tentu sebagai model pendidikan Islam berbasis umat, ini bisa menjadi sebuah "model". Tetapi perlu dicermati bahwa kondisi setiap daerah berbeda, maka model-model itu tidak harus seragam, yang lebih penting dikedepankan sebenarnya bagaimana membangun madrasah model "Madrasah Wajib Belajar" dengan *life skill*-nya, atau semacam "Madrasah Kejuruan". Hal ini mengingatkan tidak semua lulusan madrasah melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi masuk ke lapangan kerja. Dengan demikian perlu orientasi baru, yaitu menjadikan madrasah sebagai bagian tak terpisahkan dari realitas kebutuhan tenaga kerja di daerahnya. Kalau ini dapat dirintis, pemerintah daerah pasti akan menjadikannya "proyek-unggulan".

Munculnya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi dalam bidang pendidikan bertujuan untuk memberi peluang kepada peserta didik untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, tidak mengagetkan para pengelola madrasah yang telah otonom. Madrasah juga lebih *survive* dalam kondisi perubahan kurikulum yang sangat cepat, karena kehidupan madrasah tidak taklid kepada kurikulum nasional. Manajemen akan memberikan kewenangan kepada sekolah untuk melaksanakan PBM sesuai dengan kebutuhan yang dikondisi-kan untuk kebutuhan lokal.

Dengan demikian, madrasah mendapatkan angin segar untuk bisa lebih exist dalam mengatur rumah tangganya sendiri tanpa intervensi pemerintah pusat dalam upaya mencapai peningkatan mutu pendidikannya. Melalui proses belajar mengajar yang didasari dengan kebutuhan lokal, kurikulum tidak terbebani dengan materi lain yang sesungguhnya belum atau bahkan tidak relevan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik pada jenjang tersebut. Efektivitas proses belajar mengajar diharapkan bisa tercapai sehingga menghasilkan prestasi belajar yang lebih tinggi.

Adapun meningkatnya keterlibatan pemerintah dalam pendidikan menyebabkan para pengelola madrasah memfokuskan pada program-program tambahan sebagai sarana meningkatkan kualitas pendidikan. Program remedial dan kursus untuk meningkatkan perkembangan kognitif, sosial dan emosional dari siswa yang berkemampuan rendah dalam taraf perekonomian dan hasil belajar merupakan program-program kompensasi, bukan untuk menggantikan program-program yang ada.

Menurut A. Malik Fadjar kunci untuk memposisikan madrasah secara strategis yang dapat diperhitungkan dan prospeknya akan menjanjikan harus berpijak pada manajemen. Niat baik saja tidak cukup, tetapi harus didukung dengan manajemen yang

baik. Bagi daerah, sekarang ini punya peluang untuk memiliki lembaga pendidikan yang "bertaraf" nasional, regional dan internasional, sebagaimana yang ditegaskan dalam UU Sisdiknas No. 20 Th 2003. Karena ini perlu kerja keras, maka tidak ada jalan lain kecuali memulai. Melakukan hal ini menurut hlm.K. Ojong (Bapak pendiri Kompas-Gramedia), merupakan sebuah modal tersendiri. Posisikan madrasah sebagai wahana terpercaya pada proses "*human investment*".

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemikiran pendidikan A. Malik Fadjar bercorak ***modernis-agamis. Modernis*** karena berorientasi pada masa sekarang dan yang akan datang, selalu menerima perubahan, bersikap terbuka, inovatif dan progresif. ***Agamis*** karena pandangan (latar belakang keluarga, pendidikan, dan budaya organisasi) A. Malik Fadjar tetap bertumpu pada nilai-nilai ajaran agama Islam sebagaimana terdapat dalam al-Quran dan al-Hadis serta pengetahuan modern yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Corak pemikirannya terlihat pada visi, misi, dan tujuan pendidikan, kurikulum, sumber daya manusia, kelembagaan dan manajemen pendidikan.

Visi A. Malik Fadjar dalam bidang pendidikan (khususnya perguruan tinggi) adalah mewujudkan perguruan tinggi yang modern. Selanjutnya, Misi atau langkah yang dilakukan A. Malik Fadjar yaitu melakukan pentahapan dalam mengelola perguruan tinggi ini yaitu: tahap konsolidasi, pembangunan fisik, dan pembangunan akademik. Adapun tujuan pendidikannya adalah untuk menjadikan manusia paripurna (*insān kāmil*) yang berpijak pada konsep tauhid yang bermuara pada integrasi keilmuan antara sains dan teknologi, jiwa dan raga, duniawi dan ukhrawi, yang pada akhirnya akan menciptakan umat yang terbaik.

Malik Fadjar berpendapat bahwa kurikulum harus ditata dan diotonomikan sehingga pada praksisnya lebih dapat marketabel, lebih bersifat luas dan luwes, maka secara praksis diharapkan pendidikan harus lebih kreatif, inovalif, fleksibel dan produktif.

Menurut A. Malik Fadjar bahwa pendidikan dibangun dan dikembangkan sebagai sistem sekaligus aktivitas di masyarakat, bangsa, dan negara secara sengaja dan terencana. Di samping pemikiran A. Malik Fadjar berkaitan tentang pengembangan kreativitas, beliau juga memiliki pemikiran dalam pengembangan SDM bermuara untuk memperkuat kebudayaan sebagai akar dan pendukung kelangsungan pendidikan.

Pandangan A. Malik Fadjar dalam hal kelembagaan bermuara pada pembaruan dan modernisasi pendidikan. Sedangkan Manajemen A. Malik Fadjar, khususnya dalam menggagas dan menampilkan model kampus unggulan adalah manajemen yang unik. Pada satu sisi dia selalu menuntut profesionalitas jajarannya. Tetapi, dia tidak mau profesional seseorang diukur dalam konteks jasa-uang sebagaimana ukuran yang

- dikembangkan dalam dunia profesional bisnis. A. Malik Fadjar tetap menggunakan pengabdian dan dedikasi sebagai ukuran.
3. Adapun pemikiran pendidikan A. Malik Fadjar dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan dari luar. Faktor dari dalam adalah latar belakang pendidikan, kepribadian, dan keluarga A. Malik Fadjar, sedangkan faktor dari luar adalah lingkungan pergaulan, jabatan, dan situasi sosial politik pada zamannya.
  4. Konsep pendidikan ini masih cukup relevan untuk diterapkan di masa sekarang, karena konsep pendidikan yang ditawarkan A. Malik Fadjar ini dinilai cukup berhasil terutama ketika diterapkan di UMM.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. (2010) *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*. Bandung: Marja.
- Barizi, A. (ed.) (2005) *Holistika Pemikiran Pendidikan A. Malik Fadjar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Damanhuri, A., Mujahidin, E. and Hafidhuddin, D. (2013) *Inovasi pengelolaan pesantren dalam menghadapi persaingan di era globalisasi*, *Jurnal Ta'dibuna*.
- Dewey, J. (1964) *Democracy and Education: An Introduction to The Philosophy of Education*. New York: The Macmillan Company.
- Echols, J. M. and Shadily, H. (1979) *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Fadjar, Abdul Malik (1992) 'Pancasila Dasar Filsafat Negara'. Yogyakarta. UMM Press.
- Fadjar, A. M. (1997) *Membangun Madrasah Sebagai Wahana Peradaban Modern, Jalan Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional*. Edited by M. D. Rahardjo. Jakarta: Intermedia.
- Fadjar, A. M. (1998a) *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan.
- Fadjar, A. M. (1998b) *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*. Jakarta: LP3NI.
- Fadjar, A. M. (2007) *Posisi dan Prospek Madrasah dalam Kerangka Otonomi Daerah. Makalah khusus untuk Seminar Nasional F1TK*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Hudijono, A. and Thayib, A. (2006) *Darah guru darah Muhammadiyah: perjalanan hidup Abdul Malik Fadjar*. Kompas.
- Idris, M. (2008) *Visi dan Praksis A. Malik Fadjar dalam Pengembangan Pendidikan Islam. Disertasi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Jalal, F. and Supriadi, D. (2001) 'Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah', *Yogyakarta: Adicita Karya Nusa*.
- Jalaluddin and Abdullah (1997) *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Jamaluddin (2003) *Mendiskusikan Kembali Eksistensi Madrasah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Mansur, A. H. et al. (2016) 'Model Pengajaran Karakter Kejujuran Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Studi Inovasi Pembelajaran di Pondok Pesantren al-Azhaar Lubuklinggau)', *Jurnal Ta'dibuna*, 5(1), pp. 1–24.
- Manti, B. B. et al. (2016) 'Konsep Pendidikan Modern Mahmud Yunus dan Kontribusinya Bagi Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia', *Jurnal Ta'dibuna*, 5(2), pp. 153–185.

- Muhaimin (2003) *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum Hingga Redefenisi Islamisasi Pengetahuan*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia.
- Mujahidin, E. (2005) *Pesantren Kilat: Alternatif Pendidikan Agama Di Luar Sekolah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Nata, A. (2005) *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nata, A. (2006) *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Pawitasari, E., Mujahidin, E. and Fattah, N. (2015) *Pendidikan Karakter Bangsa dalam Perspektif Islam (Studi Kritis Terhadap Konsep Pendidikan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)*, *Jurnal Ta'dibuna*.
- Rahim, H. (2001) *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Rahim, H. (2005) *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Rahman, F. (1982) *Islam dan Modernitas, tentang Transformasi Intelektual. (Terjemahan Ahsin Mohammad)*. Bandung: Pustaka.
- Rosyadi, A. R., Mujahidin, E. and Muchtar, A. (2013) 'Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliah di Kabupaten Pandeglang', *Jurnal Ta'dibuna*, 2(1), pp. 1-16.
- Steenbrink, K. A. (1986) *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. Jakarta. LP3ES.
- Suhadi, E. et al. (2014) 'Pengembangan Motivasi dan Kompetensi Guru dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Madrasah', *Jurnal Ta'dibuna*, 3(1), pp. 42-60.
- Supiana (2008) *Sistem Pendidikan Madrasah Unggulan di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Tangerang, Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandung, dan Madrasah Aliyah Negeri Darussalam Ciamis. Disertasi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Surahman, E. et al. (2014) 'Pengembangan Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat Sekolah Menengah Atas dalam Perspektif Islamisasi Ilmu dan Pembinaan Akhlak Mulia', *Jurnal Ta'dibuna*, 3(2), pp. 31-37.
- Suyatno (2009) *Pengembangan Profesionalisme Guru; 70 Tahun Abdul Malik Fadjar*. Jakarta: Uhamka Press.
- Wahyuni, M. (1995) *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun*. Jakarta: Paramadina.
- Wexley, K. N. and Yukl, G. H. (1977) *Organizational Behaviour and Personal Psychology*. New York: Ontario Richard D. Irwin Inc.
- Yasmadi (2002) *Modernisasi Pesantren: Kritikan Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Jakarta: Ciputat Press.